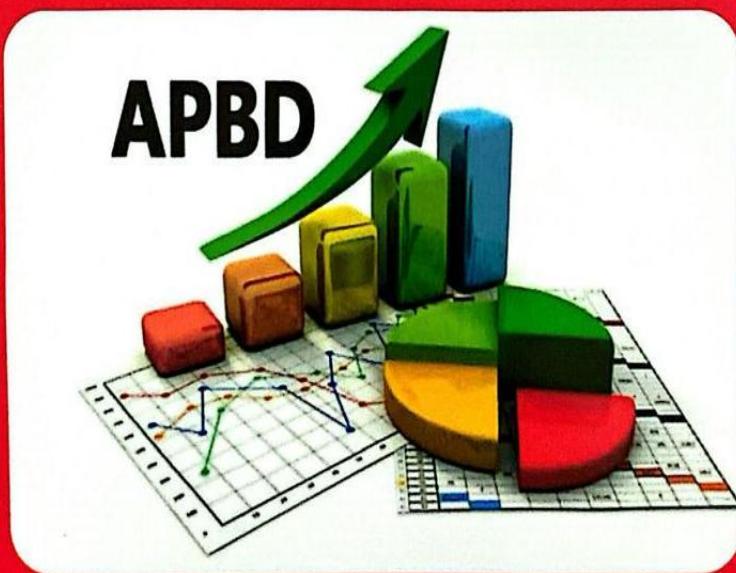


PELAKSANAAN KEWENANGAN AUDITOR BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PRESPEKTIF

SIYASAH MALIYAH

(Studi Kasus Pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2020)

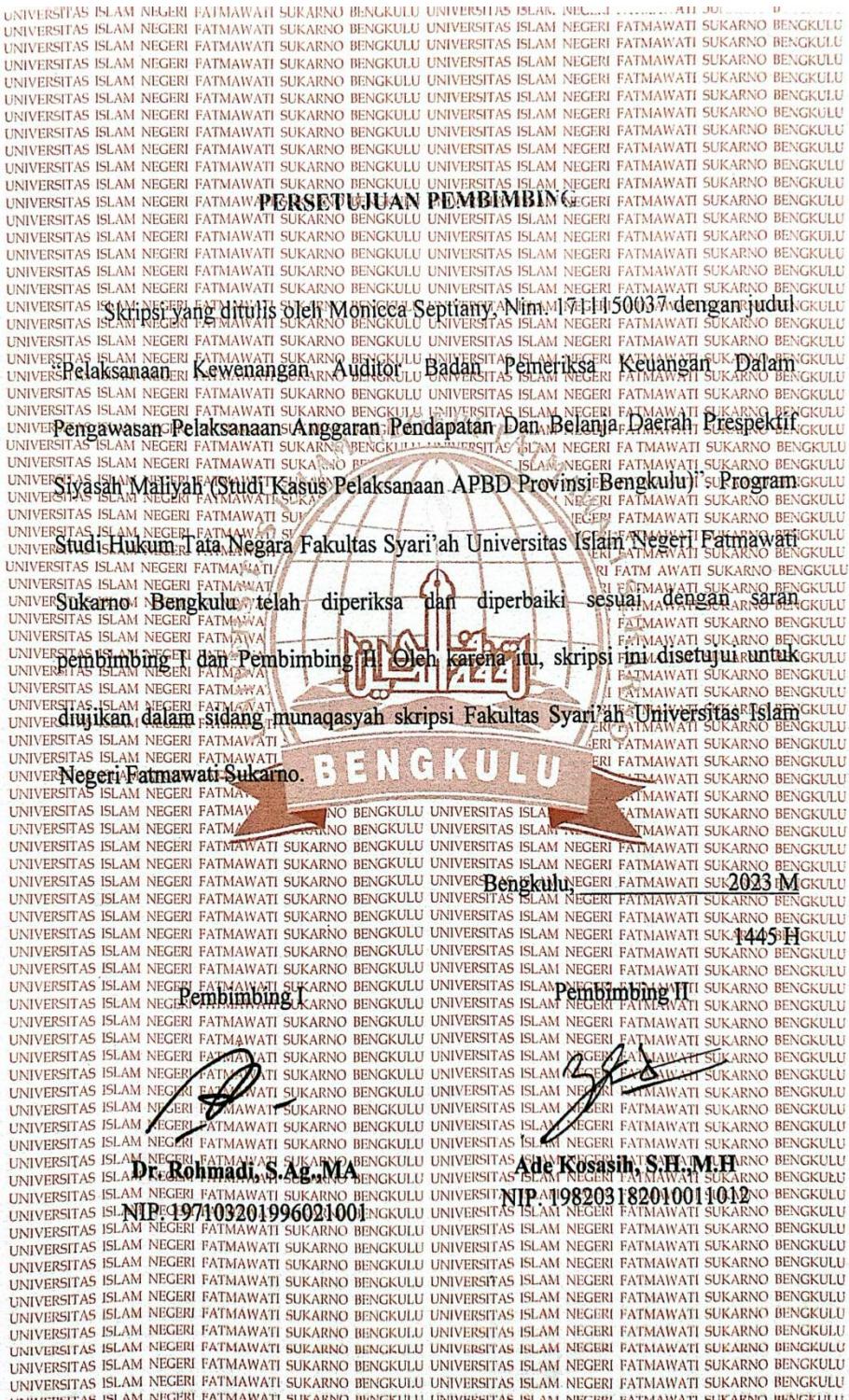


MONICCA SEPTIANY

**PELAKSANAAN KEWENANGAN AUDITOR BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PRESPEKTIF SIYASAH MALIYAH**
(Studi Kasus Pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2020)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
(UINFAS) BENGKULU
2024 M/1445 H**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

SUKARNO BENGKULU

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telp (0736) 51276-53879 Faksimil (0736) 51171-51172

Website: www.iainbengkulu.ac.id

Skrripsi oleh **Monica Septiani**, NIM 1711150037 yang bertujuan **Pelaksanaan kewenangan auditor pada pemeriksa keuangan dalam pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah/ persepektif siyasah maliyah (studi kasus pelaksanaan APBD provinsi bengkulu)** Program Studi Hukum Tatanegara

telah djury dan diperbaikannya didepan tim sidang Munaqosyah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada

Universitas Islam Negeri Fatmawati rabu

Tanggal : 10 januari, 2024

Dan layak dinyatakan lulus, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna

memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu Hukum Tatanegara

Bengkulu,

Dekan

Prof. Dr. Suwirjan, M.A.

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqosyah

Ketua

Dr. Rohmadji, S.Ag., M.A.

NIP. 197103201996021001

Pengajar I

Ade Kosasih, S.H.

NIP. 198203182010011012

Pengajar II

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

NIP. 197705052007102002

Pengajar III

A. Majid, S.Sos., M.Si

NIP. 196504011986021007

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Pelaksanaan kewenangan auditor badan pemeriksa keuangan dalam pengawasan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah perspektif siyasah maliyah (Study kasus pelaksanaan APBD provinsi Bengkulu tahun 2020)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di UIN FAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 18 Rabiul Akhir 1445 H
02 November 2023 M

Mahasiswa yang menyatakan



MOTTO

“Jangan buang hari ini dengan menghawatirkan hari esok, Gunung pun terasa datar ketika kita sampai kepuncaknya”

“kalaualah kegagalan adalah hujan dan kesuksesan bagaikan matahari, maka kita butuh keduanya untuk bisa melihat pelangi”



PERSEMBAHAN

- Terima kasih untuk kedua orang tua, Bapak (Feri Oswari) Ibu (Sri Muliani) yang telah membesarkan, mendidik, mendo'akan, dan mendukung saya. Terima kasih telah menjadi orang tua yang terbaik untuk saya , terima kasih juga untuk semua kerja keras kalian, jasa kalian takkan mungkin dapat saya balas dengan apa pun itu. Semoga saya dapat membahagiakan kalian dan membuat kalian bangga.
- Terima kasih untuk Adikku (Indah Puspita Sari, S.Pd) atas perhatian dan kasih sayangnya, tawa canda mu adalah semangat untukku.
- Terima kasih tak henti-hentinya sata ucapan kepada Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Rohmadi. S.Ag., M.A. yang telah mengarahkan dan memberikan pengetahuan selama di UINFAS.
- Terima kasih juga kepada Dosen Pembimbing II saya Bapak Ade Kosasih. SH, MH. Yang telah memberikan banyak ilmu terhadap saya.
- Para sahabat Till Jannah, Ayu Wulandari. SH, Via Indri Yulita. SH, Herda Ananda Pratiwi. SH, Widia Nova Sari. SH, Puspita Sari. SH, Muhammad Aziz Amrullah. SH, Terima kasih atas semangat yang kalian berikan, mendengarkan keluh kesah saya, suka duka tetap bersama saya.
- Kepada Alvin Anugrah Varindra. A, Cahyan Fazikun. Amd., Farm, Rahmad Al Hafiz. S.Pd, terima kasih telah hadir membawa semangat, dan canda tawa baru di hidup saya.
- Terima kasih untuk semua teman-teman yang tidak dapat sebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirahim.

Alhamdulillah kalimat mulia yang selalu kita lafadzkan sebagai bentuk puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT zat yang maha mulia, berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan tuntas. Dalam skripsi ini, penulis meneliti perihal yang berjudul **“Pelaksanaan Kewenangan Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Prespektif Siyasah Miliyah (Studi Kasus Pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2020)”**.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk membawa risalah serta misi kemanusiaan sehingga manusia mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Jurusan Syariah Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dan berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.A Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Ifansyah putra, M. Sos selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Bapak Dr. Rohmadi. S.Ag.,M.A selaku Pembimbing I dan Ade Kosasih, S.H., M.H. selaku Pembimbing II

5. Bapak dan Ibu Dosen fakultas syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan
6. Pejabat dan Staf administrasi fakultas syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
7. Semua Pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan Skripsi ini, tentu tidak luput dari khilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik Skripsi ini kedepannya.



Bengkulu, 02 November 2023
Penulis

MONICCA SEPTIANY
NIM: 1711150037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUANG PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTO	v
DAN PERSEMBAHAN	v i
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISIxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
1. Kegunaan Teoritis	6
2. Kegunaan Praktis	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	1
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	13
3. Subjek/ Informan Penelitian	13
4. Sumber Data.....	14
5. Teknik Pengumpulan Data.....	14
6. Teknik Analisis Data.....	6
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KAJIAN TEORI	17
A. Teori Kewenangan.....	17
1. Pengertian Kewenangan	17
2. Pembagian Kewenangan.....	21
3. Cara Memperoleh Kewenangan	23
B. Teori Pengawasan.....	28

1. Pengertian dan Konsep Pengawasan	28
2. Tipe-Tipe Pengawasan	30
3. Tujuan dan Prinsip Pengawasan	31
4. Proses Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah	32
C. Fiqh Siyasah Maliyah	34
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah Maliyah</i>	34
2. Sumber Hukum Fiqh Siyasah Maliyah.....	35
3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Maliyah.....	40
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	43
A. Profil BPK Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu	43
1. Sejarah Berdirinya Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu .47	47
2. Dasar Hukum Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu49	49
3. Visi dan Misi Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu49	49
B. Profil BPKP Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu	53
1. Visi misi dan Nilai.....	53
2. Wilayah Kerja dan Ruang Lingkup.....	54
3. Struktur Organisasi BPKP Provinsi Bengkulu.....	55
4. Tugas dan Fungsi BPKP Provinsi Bengkulu	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Pelaksanaan Kewenangan Auditor BPK Dalam Pengawasan Belanja APBD Provinsi Bengkulu.....	59
B. Tinjauan <i>Siyasah Maliyah</i> Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Auditor BPK Dalam Pengawasan Belanja APBD Provinsi Bengkulu	67
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Pelaksanaan Kewenangan Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Prespektif *Siyasah Maliyah* (Studi Kasus Pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2020) oleh Monicca Septiany, NIM. 1711150037

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewenangan auditor BPK dalam pengawasan APBD Provinsi Bengkulu dan bagaimana tinjauan *siyasah maliyah* terhadap pelaksanaan kewenangan auditor BPK dalam pengawasan belanja APBD Provinsi Bengkulu. Dalam penelitian, penulis menggunakan Jenis penelitian lapangan (*field research*). Informan dalam penelitian ini, yaitu : Auditor BPK Kantor Perwakilan Bengkulu, Auditor BPKP Kantor Perwakilan Bengkulu dan Auditor Inspektorat Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa, Pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK Kantor Perwakilan Bengkulu terhadap Pemerintah Provinsi Bengkulu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum yang diatur didalam peraturan BPK Nomor 56a/K/I-XX.2/9/2007 yang meliputi tiga tahapan pokok, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil audit. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2022.

Dalam kajian *siyasah maliyah* Rasulullah saw Pun telah menjadikan pemeriksaan atas perkara-perkara yang terjadi dalam masalah hak-hak semua orang yang diatur negara untuk masyarakat merupakan kewenangan lembaga *mazhalim* pada saat itu. Wilayah *mazhalim*

juga bertugas sebagai pencatat administrasi negara. Ruang lingkup kerjanya mengidentifikasi apakah ada pelanggaran, pengurangan, penambahan atau penggelapan.dalam melaksanakan tugas ini pejabat *mazhalim* tidak perlu menunggu adanya pihak penuntut. Dengan demikian, jika kita lihat kewenangan dan tugas BPK maka hampir sama atau memiliki kedudukan dan fungsi yang sama dengan *mazhalim*. Pelaksanaan kewenangan audit BPK terhadap pelaksanaan dan Pengawasan APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2020 sudah sesuai dengan berdasarkan kajian *siyasah maliyah* karena telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dan tidak berentengan dengan ajaran Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam kajian *siyasah maliyah*.

Kata Kunci : Kewenangan, Auditor, BPK, *Siyasah Maliyah*



ABSTRACT

Implementation of the Authority of the Auditor of the Financial Audit Agency in Supervising the Implementation of the Siyasah Malyah Perspective Regional Revenue and Expenditure Budget (Case Study of the Implementation of the 2020 Bengkulu Province APBD) by Monicca Septiany, NIM. 1711150037

This research was conducted to find out how the BPK auditor's authority is implemented in supervising the Bengkulu Province APBD and how the siyasah malyah reviews the BPK auditor's authority in supervising Bengkulu Province APBD expenditure. In the research, the author used field research. The informants in this research were: BPK Auditor for the Bengkulu Representative Office, BPKP Auditor for the Bengkulu Representative Office and Auditor for the Bengkulu Province Inspectorate.

Based on research conducted by the author, it is known that, the financial audit carried out by the BPK Bengkulu Representative Office on the Bengkulu Provincial Government was carried out in accordance with the general provisions regulated in BPK regulation Number 56a/K/I-XX.2/9/2007 which includes three main stages, namely planning, implementing and reporting audit results. Based on the audit results of the Financial Audit Agency (BPK), including the implementation of the action plan that has been implemented by the Bengkulu Provincial Government (Pemprov), the BPK provides an Unqualified Opinion (WTP) on the Bengkulu Province Regional Government Financial Report (LKPD) for the Fiscal Year (FY). 2022.

In the study of siyasah malyah, Rasulullah SAW also made it the authority of the mazhalim institutions at that time to examine cases that occurred regarding the rights of all people which were regulated by the state for society. The mazhalim region also serves

as the state administrative recorder. The scope of work is to identify whether there are violations, deductions, additions or embezzlement. In carrying out this task, mazhalim officials do not need to wait for the prosecution. Thus, if we look at the authority and duties of the BPK, they are almost the same or have the same position and function as the mazhalim. The implementation of the BPK's audit authority over the implementation and supervision of the 2020 Bengkulu Province APBD is in accordance with the siyasah maliyah study because it has been carried out in accordance with the principles and does not conflict with Islamic teachings as explained in the siyasah maliyah study.

Keywords: Authority, Auditor, BPK, Siyasah Maliyah

